

KONTRIBUSI HUTAN PINUS RAKYAT TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI TANA TORAJA

The Contribution of Pine Community Forest to the Community Income in Tana Toraja Regency

Daud Malamassam

ABSTRACT

A study on the contribution of community forest to the community income in Tana Toraja Regency was implemented with the aim of identifying the community forest contribution to owners income and formulating the effort that can be carried out for enhancing the contribution. As the result, the community forest contribution to owners income is still very low (2.94% in average). Based on analysis result, the potential revenue of community forest farming in Tana Toraja Regency can be 2.3 larger than the present obtaining revenue. The mentioned potential revenue can be more increased by developing a more proportional allocation of the revenue to the related farmers (related communities)

Key words : Community forest, contribution, community income, forest product and benefit

PENDAHULUAN

Hutan Rakyat di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Tana Toraja, selama ini telah berperan secara nyata dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat; mulai dari kayu bakar, bahan untuk kelengkapan sarana pada upacara-upacara keagamaan atau adat, sampai pada pemenuhan bahan bangunan, terutama bangunan Rumah Adat di Tana Toraja yang semula seluruh bahannya terdiri dari kayu dan bambu hasil hutan rakyat. Sejalan dengan semakin menurunnya produksi hutan alam, produksi kayu dari hutan rakyat pada satu sisi, semakin menjadi andalan dalam upaya pemenuhan kebutuhan kayu, baik bagi warga masyarakat maupun bagi industri per kayu. Namun pada sisi lain, keberadaan hutan rakyat ini semakin terdesak oleh adanya aktivitas penebangan yang tidak terkendali untuk memenuhi permintaan kayu yang diikuti pula oleh desakan perluasan penanaman sejumlah komoditas tanaman yang lebih menawarkan 'nilai sewa lahan' yang lebih menjanjikan.

Kondisi di atas menuntut adanya upaya pengembangan pemahaman tentang fungsi dan peranan hutan rakyat beserta urgensi pelestariannya pada masa mendatang. Hal ini juga berlaku bagi Hutan Pinus Rakyat di Kabupaten Tana Toraja. Salah satu hal yang dapat mendukung upaya pengembangan pemahaman tentang fungsi, peranan dan urgensi pelestarian suatu sumberdaya adalah adanya pengetahuan

tentang kontribusi sumberdaya yang bersangkutan terhadap pendapatan masyarakat beserta potensi pengembangannya. Penelitian yang hasilnya dituangkan dalam tulisan ini bertujuan untuk :

- (1) mengidentifikasi kontribusi hutan rakyat terhadap pendapatan pemiliknya,
- (2) merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi hutan rakyat terhadap pendapatan pemiliknya.

BAHAN DAN METODE

Jenis Data dan Metode Pengumpulannya

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer antara lain meliputi data kerapatan dan potensi tanaman pinus per satuan luas serta data pendapatan petani, khususnya yang bersumber dari hasil hutan rakyat. Sedang data sekunder antara lain meliputi luas dan penyebaran tanaman di setiap bagian wilayah.

Pengumpulan data potensi tegakan dilakukan dengan menggunakan petak-petak ukur seluas 0,1 Ha yang dipilih secara purposif (Malamassam, 1998) dengan mengupayakan agar semua kondisi tanaman pada masing-masing bagian wilayah dapat terwakili. Jumlah petak ukur yang diamati pada masing² bagian wilayah (10 kecamatan) adalah minimal 30 buah (Tiro, 2000).

Pengumpulan data pendapatan petani dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah petani contoh. Jumlah responden yang dipilih untuk diwawancarai juga ditetapkan minimal 30 orang pemilik hutan rakyat untuk setiap kecamatan.

Pengolahan Data

Kontribusi hasil hutan rakyat terhadap pendapatan masyarakat (petani hutan rakyat) dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai pendapatan dari usaha tani hutan rakyat dengan total pendapatan petani, yang dinyatakan dalam persen (%). Nilai pendapatan termaksud hasil pengolahan terhadap data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan petani-petani contoh.

Juga dihitung pendapatan potensial dari usaha tani hutan rakyat, yang didasarkan atas hasil perhitungan total potensi hutan rakyat dan etat atau jatah tebang tahunan dengan asumsi daur selama 20 tahun. Untuk perhitungan etat tersebut digunakan rumus (Davis, 1982), sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Etat Luas (E}_L) &= \text{Luas Efektif / daur} \\ \text{Etat Volume (E}_V) &= \text{Luas Efektif x Volume rata-rata} \\ &\quad \text{per Ha / daur} \end{aligned}$$

Data luas yang digunakan dalam perhitungan adalah data resmi yang dikeluarkan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja (2005). Berhubung karena pengukuran luas hutan 'pinus' rakyat secara langsung tidak dilakukan maka diassumsikan bahwa luas hutan rakyat yang memproduksi secara efektif adalah 75% dari total luas yang tercatat. Selanjutnya data volume yang digunakan adalah data volume hasil pengukuran langsung terhadap sejumlah petak ukur contoh di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Petani Pemilik Hutan Rakyat

Data tentang pemilik dan kepemilikan hutan rakyat merupakan informasi dasar bagi upaya penelusuran peranan hutan rakyat dalam mendukung perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sehubungan dengan itu, telah dilakukan pendataan pemilik dan kepemilikan

hutan rakyat di 10 kecamatan melalui wawancara terhadap 332 KK responden pemilik hutan rakyat. Sebagai hasil, diketahui bahwa hampir separuh dari responden (49,4%) berumur di atas 50 tahun, dan hanya 2,71% responden yang berumur di bawah 30 tahun, sedang selebihnya berumur antara 30 sampai 50 tahun. Informasi ini patut diberi perhatian, karena sangat terkait dengan keberlangsungan pengelolaan hutan rakyat pada masa mendatang. Ketiadaan regenerasi pengelola potensial menjadi ancaman bagi kesinambungan pengelolaan hutan rakyat.

Selanjutnya diketahui pula bahwa mayoritas responden pemilik hutan rakyat memiliki jumlah tanggungan keluarga kurang dari delapan orang (96,39%). Malahan dari jumlah ini, 46,39% diantaranya memiliki tanggungan kurang dari empat orang. Keluarga yang memiliki anggota lebih dari lima orang nampaknya merupakan keluarga tiga generasi (nenek-kakek, ibu-bapa dan anak-anak). Jumlah anggota yang tergolong angkatan kerja yang lebih sedikit dari jumlah anggota yang non angkatan kerja. Informasi ini perlu dianalisis lebih jauh, terutama dalam kaitannya dengan ketersediaan tenaga kerja lokal kepentingan pengeolaan hutan rakyat ataupun bagi kepentingan berbagai aktivitas lainnya.

Luas lahan garapan dan kepemilikan hutan rakyat

Data mengenai luas areal penggunaan lahan berdasarkan hasil wawancara pada wilayah sampel disajikan pada Tabel 1. Angka-angka pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa luas lahan garapan berupa hutan rakyat adalah rata-rata seluas 1,17 Ha, dengan rentang yang cukup lebar, yaitu dari 0,25 Ha sampai 6,0.

Secara umum, luas kepemilikan lahan berupa hutan rakyat ini jauh lebih dari luas lahan untuk penggunaan lain, seperti sawah dan kebun. Hal ini dapat bermakna bahwa pengelolaan hutan rakyat secara lebih baik potensial untuk memberikan kontribusi yang lebih bermakna secara berkesinambungan bagi para pemiliknya, terutama bagi mereka yang memiliki hutan rakyat lebih dari 2,0 Ha. Namun untuk itu, dibutuhkan upaya-upaya pembinaan agar mereka dapat menyelenggarakan pengelolaan hutan secara baik.

Table 1. *Kinds of Land Possessed by Community Forest Owner in Tana Toraja Regency*

Kinds of Land	Possessed land area per Household (Ha)			Standard Deviation (Ha)
	Minimum	Average	Maximum	
1. Sawah	0,05	0,79	3,50	0,56
2. Kebun	0,10	0,90	3,00	0,60
3. Hutan Rakyat	0,25	1,17	6,00	1,03
4. Lainnya	0,25	0,41	1,00	0,27

Table 2. The average of Land ownership and the number of community forest owner in observes area

District	The average land ownership (Ha)	The Number of owner (Household)
1. Mengkendek	1,37	1.973
2. Sangalla'	2,22	718
3. Buntao' Rantebua	1,66	733
4. Tondon Nanggala	1,32	108
5. Rantetayo	0,89	1.817
6. Saluputti	1,38	233
7. Bittuang	1,00	418
8. Rindingallo	0,92	2.185
9. Sesean	0,32	328
10. Sa'dan Balusu	0,63	268

Perincian rata-rata luas kepemilikan hutan rakyat pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Tana Toraja disajikan pada Tabel 2. Nilai rata-rata umum dari luas kepemilikan adalah 1,17 Ha. Kecamatan Sangalla mengindikasikan rata-rata luas kepemilikan hutan rakyat terbesar yaitu sekitar 2,2 Ha, sedang Kecamatan Sesean memperlihatkan rata-rata luas kepemilikan terkecil, yaitu 0,32 ha.

Dalam hal jumlah pemilik hutan rakyat, Kecamatan Rindingallo jumlah pemilik hutan rakyat terbanyak, yaitu 2.185 petani, kemudian secara berturut-turut diikuti oleh Kecamatan Mengkendek (1.973 petani) dan Kecamatan Rantetayo (1.817 petani). Jumlah pemilik yang cukup besar dengan luas kepemilikan yang relatif kecil untuk masing-masing pemilik, dapat berkonsekuensi pada pengorganisasian pengelolaan, dan khususnya pengaturan hasil, yang relatif lebih rumit.

Sehubungan dengan kondisi yang dimaksudkan di atas, diperlukan langkah-langkah antisipasi melalui upaya-upaya pembinaan atau pengembangan kapasitas para pemilik hutan rakyat, baik menyangkut hal-hal teknis kehutanan dan aspek kelembagaan maupun menyangkut pengembangan kesamaan pemahaman tentang

urgensi pelestarian hutan rakyat dan pengembangan kebersamaan dalam upaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kepentingan perlindungan lingkungan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka dikuatirkan bahwa setiap pemilik hutan rakyat akan menebang dan memanfaatkan tanaman pinus mereka dalam waktu yang relatif singkat, selama terbuka kesempatan untuk itu. Dengan kata lain, tanpa adanya upaya-upaya pembinaan yang terprogram maka tanaman pinus rakyat (dan juga tanaman hutan rakyat lainnya) yang tumbuh dan berkembang selama periode waktu 20 sampai 30 tahun, potensial akan habis ditebang oleh pemiliknya dalam waktu beberapa tahun saja

Kontribusi hutan rakyat terhadap pendapatan petani

Tabel 3 memperlihatkan pendapatan masyarakat dari hutan rakyat, yaitu rata-rata sebesar Rp.259.100,- dan berkisar antara Rp.95.000,- per tahun sampai Rp.522.000,- per tahun. Nilai terbesar diperlihatkan oleh pemilik hutan rakyat di Kecamatan Tondon Nanggala, sedang nilai terkecil diperlihatkan oleh pemilik hutan rakyat di Kecamatan Buntao'.

Table 3. Annually income being contributed by community forest in observed area

District	Annually income		
	Total Income (IDR)	Contribution of Community Forest	
		IDR	Percentage (%)
1. Mengkendek	6.190.000	290.500	4,69
2. Sangalla'	4.149.000	109.000	2,63
3. Buntao' Rantebua	6.371.000	95.500	1,50
4. Tondon Nanggala	9.589.000	522.000	5,44
5. Rantetayo	11.611.000	250.000	2,15
6. Saluputti	13.486.000	117.000	0,87
7. Bittuang	10.291.000	158.000	1,54
8. Rindingallo	8.924.000	344.000	3,85
9. Sesean	8.233.000	223.000	2,71
10. Sa'dan Balusu	9.306.000	482.000	5,18
Rata-rata / Average	8.815.000	259.100	2,94

Hal yang mungkin patut dicatat ialah bahwa pemilik hutan rakyat di Kecamatan Mengkendek dimana pengelolaan hutan pinus sudah dilakukan secara intensif sejak tahun 2002, justru melaporkan nilai pendapatan dari hasil hutan rakyat yang relatif kecil, yaitu hanya sebesar Rp.290.500,- per tahun. Kondisi serupa juga dijumpai di Kecamatan Rantetayo (Rp.250.000,- per tahun), Kecamatan Sangalla (Rp.109.000,- per tahun), dan Kecamatan Buntao' Rantebua (Rp.95.000,- per tahun).

Nilai-nilai perolehan termaksud di atas lebih kecil dari nilai perolehan pemilik hutan rakyat di Kecamatan Sa'dan Balusu (Rp.482.000,- pertahun) dan Kecamatan Rindingallo (Rp.344.000,- per tahun). Angka-angka ini sekaligus mengindikasikan bahwa pengolahan dan pemanfaatan pinus rakyat, pada kecamatan tersebut terdahulu di atas, secara relatif, belum memberikan kontribusi yang bermakna bagi pendapatan para pemiliknya. Pernyataan ini didukung pula oleh nilai relatif pendapatan dari hasil hutan rakyat terhadap terhadap nilai total pendapatan. Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa hanya pemilik hutan rakyat di Kecamatan Tondon Nanggala dan Sa'dan Balusu yang memperlihatkan "kontribusi hasil hutan rakyat terhadap nilai total pendapatan" yang lebih besar dari 5%, Kecamatan Mengkendek memperlihatkan tingkat kontribusi sebesar 4,67%, sedang kecamatan lainnya memperlihatkan tingkat kontribusi di bawah 4%.

Pengelolaan lanjutan terhadap data dasar yang dikemukakan di atas menghasilkan rata-rata nilai tegakan hutan rakyat per pemilik dan rata-rata

nilai perolehan pemilik hutan rakyat setiap tahunnya dalam satu daur, dengan asumsi bahwa daur yang digunakan adalah 20 tahun, dan nilai kayu adalah Rp.60.000 per m³. Nilai-nilai tersebut disajikan pada Tabel 4. Tabel 4. menunjukkan bahwa apabila hutan rakyat di Kabupaten Tana Toraja dikelola dengan baik, maka secara rata-rata nilai tegakan per pemilik mencapai Rp.11.756.136,- Melalui pengelolaan dengan daur 20 tahun, para pemilik hutan rakyat, secara rata-rata, akan memperoleh Rp.587.807,- per pemilik per tahun. Dengan kata lain, melalui pengelolaan yang baik, perolehan dari hutan rakyat dapat ditingkatkan menjadi sekitar 2,3 kali lebih besar dari nilai perolehan saat ini. Malahan untuk Kecamatan Sangalla dan Kecamatan Buntao, peningkatan yang potensial dicapai jauh lebih besar lagi (lebih dari 10 kali lipat), yaitu masing-masing dari Rp.109.000,- menjadi Rp.1.379.025,- per tahun dan Rp.95.000,- menjadi Rp.1.013.971,- per tahun.

Pola pemanfaatan hasil hutan rakyat

Pola pemanfaatan hutan rakyat yang dimaksudkan disini adalah perbandingan antara porsi hasil hutan rakyat yang dimanfaatkan sendiri dengan porsi yang dijual, sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 5. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 15,66% responden menyatakan bahwa menjual hasil hutan rakyat mereka kurang dari 20% dari keseluruhan hasil yang mereka peroleh. Sekitar 49,40% yang menyatakan bahwa bagian hasil hutan rakyat yang mereka manfaatkan sendiri seimbang dengan bagian yang dijual.

Table 4. The estimated stumpage value and the average annually revenue of community forest during a rotation of 20 years

District	Average potency per owner			Estimated Sumpage value per owner	
	Ha	m ³ per Ha	m ³	IDR	IDR per year
1. Mengkedek	1,37	168,75	231,19	13.871.227	693.561
2. Sangalla	2,22	207,06	459,68	27.580.505	1.379.025
3. Buntao'Rantebua	1,66	203,61	337,99	20.279.421	1.013.971
4. Tondon Naggala	0,92	148,46	136,59	8.195.195	409.760
5. Rantetayo	0,89	148,46	132,13	7.927.960	396.398
6. Saluputti	1,38	133,52	184,25	11.055.189	552.759
7. Bittuang	1,00	143,23	143,23	8.593.527	429.676
8. Rindingallo	0,32	146,48	46,87	2.812.374	140.619
9. Sesean	0,63	146,48	92,28	5.536.860	276.843
10. Sa'dan Balusu	1,32	147,84	195,15	11.709.107	585.455
Rata-rata / Average	1,17	159,39	195,94	11.756.136	587.807

Table 5. The portion of community forest product being utilized by the owner

The portion of community forest product being utilized by the owner	The number of owner	
	Household	Percentage (%)
1. ≤ 20%	7	2,11
2. 21% - 40%	31	9,34
3. 41% - 60%	164	49,40
4. 61% - 80%	78	23,49
5. > 80%	52	15,66
Jumlah / Total	332	100,00

Berdasarkan angka-angka pada Tabel 5 dapat dikemukakan bahwa secara umum, para pemilik hutan rakyat yang memanfaatkan sendiri hasil hutannya relatif masih lebih banyak dari pada mereka yang menjual hasil hutan rakyatnya. Hal ini dapat bermakna bahwa sampai saat ini para pemilik hutan rakyat di Tana Toraja, secara umum, belum dapat menikmati manfaat ekonomi dari sumberdaya hutan yang dimilikinya secara optimum. Dengan demikian masih sulit diharapkan bahwa para pemilik hutan rakyat ini dapat melakukan pengelolaan hutan milik mereka secara optimum. Sehubungan dengan itu, diperlukan program atau upaya-upaya pembinaan para pemilik hutan rakyat ini agar mereka mampu mengembangkan atau meningkatkan manfaat ekonomi dari sumberdaya hutan yang dimilikinya, tetapi tanpa harus mengabaikan fungsi lindung dari sumberdaya yang bersangkutan.

Untuk melengkapi informasi tentang jumlah perolehan petani dari hasil penjualan kayu hasil

hutan rakyat, maka pada Tabel 6 disajikan harga pembelian kayu pada lokasi yang berbeda yang dilakukan oleh dua pembeli utama hasil hutan rakyat (khususnya pinus) di Tana Toraja.

Tabel 6 memperlihatkan adanya perbedaan tarif/harga kayu yang cukup mencolok antar setiap tingkatan, khususnya untuk log (kayu bulat). Tabel 6 juga mengindikasikan bahwa porsi nilai hutan yang diterima oleh pemilik hutan rakyat berupa tanaman pinus di Kabupaten Tana Toraja masih tergolong kecil. Porsi nilai yang dimaksudkan jauh lebih kecil dari porsi nilai yg didapatkan oleh pedagang pengumpul (Rp.54.000,- berbanding Rp.106.000,-). Hal ini sekaligus bermakna bahwa nilai sewa lahan hutan selama jangka waktu produksi, yaitu sekitar 25 sampai 30 tahun, jauh lebih kecil atau tepatnya hanya sekitar 54,55% dari nilai kompensasi jasa para pengumpul selama periode waktu yang lebih terbatas (mungkin hanya satu atau dua bulan saja).

Table 6. The price of pine wood in Tana Toraja Regency

Wood specification	Price (IDR per m ³) on various Marketing location		
	Farmer	Collector	Industry
1. Kayu bulat (log)	48.000 - 60.000	150.000 - 170.000	175.000 – 200.000
2. Papan	400.000	450.000	500.000

Source : Tana Toraja Forest Service

Table 7. Plantation area and involvement rate of respondent (%) in the activities of community forest establishment in Tana Toraja during the last 15 years

Plantation area (Ha)	The involvement rate (%) in plantation activities during the period :			
	2000 - 2005	1995 - 1999	1990 - 1994	Before 1990
1. < 0,1	2,71	0,00	0,90	6,63
2. 0,2 – 0,6	9,34	3,31	12,35	47,29
3. 0,7 – 1,1	0,90	10,54	3,01	25,30
4. 1,2 – 1,6	0,30	0,00	0,30	5,72
5. 2,7 – 2,1	0,30	0,30	0,30	6,93
6. > 2,1	0,30	0,00	0,30	8,13
Jumlah / Total	13,85	14,15	17,16	100,00

Hal termaksud di atas terjadi karena belum adanya aturan yang mengatur penetapan nilai jual kayu. Untuk dapat menentukan tarif yang proporsional maka disarankan agar penentuan tarif/harga jual kayu pada setiap tingkatan dapat difasilitasi melalui pembentukan suatu wadah kemitraan yang dapat menjamin kepentingan semua pihak secara berkesinambungan dan selanjutnya diharapkan dapat berdampak positif terhadap kelestarian hutan.

Kegiatan penanaman kembali pada hutan rakyat

Kegiatan penanaman kembali, atau lebih tepatnya keseimbangan antara penanaman dan penebangan pada areal hutan rakyat, dapat merupakan salah satu indikator bagi pengelolaan hutan yang baik, yang dapat menjamin kelestarian manfaat hutan rakyat yang bersangkutan, baik bagi kepentingan pemilikinya maupun bagi kepentingan pengamanan lingkungan. Hasil pengamatan mengindikasikan bahwa kegiatan penanaman di lokasi studi cenderung menurun, sebaliknya kegiatan penebangan cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa semua responden (100%) menyatakan pernah melakukan penanaman sebelum tahun 1990. Namun hanya 13,85% responden yang melakukan penanaman dalam lima tahun terakhir, itupun 12,05%

diantaranya melakukan penanaman pada lahan dengan luas kurang dari 0,7 Ha. Pada Tabel 7 juga dapat dilihat bahwa jumlah responden yang melakukan penanaman kembali dari tahun ke tahun yang mengindikasikan semakin berkurangnya minat masyarakat untuk terlibat atau melibatkan diri dalam kegiatan penanaman hutan rakyat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik hutan rakyat dapat diketahui pula beberapa hal yang merupakan kendala dalam pengelolaan hutan rakyat antara lain adalah terjadinya kebakaran, batas kawasan yang kurang jelas, pendapatan dari hutan rakyat masih tergolong rendah karena segmen pasar terbatas, serta bantuan bibit dan sumber bibit yang masih sangat terbatas.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan data dan informasi yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan pokok sbb :

1. Rata-rata luas kepemilikan hutan rakyat di Tana Toraja adalah sebesar 1,17 Ha per kk (keluarga pemilik), yang berkisar antara 0,25 sampai 6,0 Ha.

2. Rata-rata pendapatan masyarakat dari hutan rakyat di Tana Toraja hanya sebesar Rp.259.100,- per KK per tahun. Nilai ini hanya memberi kontribusi sekitar 2,94% terhadap rata-rata pendapatan total keluarga pemilik hutan rakyat, yaitu sebesar Rp.8.815.000,- per KK per tahun.
3. Berdasarkan taksiran potensi hutan rakyat dan perhitungan jatah tebang tahunannya, maka taksiran nilai pendapatan potensial yang dapat diperoleh oleh petani pemilik hutan rakyat adalah rata-rata sebesar Rp.587.805,- per KK per tahun atau sekitar 2,3 kali lebih besar dari nilai yang dinyatakan pada butir 2. Hal ini sekaligus bermakna bahwa nilai manfaat dan kontribusi hasil hutan rakyat sebenarnya dapat ditingkatkan 2,3 kali lipat dari nilai yang dicapai saat ini.
4. Nilai manfaat dan kontribusi hasil hutan rakyat terhadap pendapatan petani masih dapat lebih ditingkatkan lagi melalui pembagian pendapatan antara petani pemilik hutan rakyat dengan pedagang pengumpul hasil hutan rakyat secara lebih proporsional. Perbandingan pendapatan yang berlaku pada saat pelaksanaan penelitian adalah rata-rata Rp.54.000,- untuk petani berbanding Rp.106.000,- untuk pedagang pengumpul.
5. Selama 15 tahun terakhir, kegiatan budidaya (penanaman kembali) hutan rakyat cenderung tidak dapat mengimbangi laju kegiatan penebangan, Hal ini potensial mengancam kelestarian hutan rakyat jika tidak dilakukan upaya-upaya penanggulangan yang signifikan.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas maka untuk lebih meningkatkan kontribusi hutan rakyat terhadap pendapatan warga masyarakat pemilik hutan rakyat, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengaturan alokasi perolehan atau keuntungan antara petani pemilik hutan rakyat dengan pedagang pengumpul hasil hutan rakyat, yang didasarkan atas hasil penelitian mendalam tentang beban biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Sekaitan dengan hal ini perlu dibangun suatu lembaga yang dapat berperan sebagai penjamin keseimbangan kepentingan pihak-pihak terkait, demi terwujudnya pengelolaan dan pendayagunaan hutan rakyat secara berkesinambungan.
2. Perlu adanya aturan dan atau kebijaksanaan menyangkut penyesuaian kegiatan penebangan dengan produktivitas hutan rakyat. Sejalan dengan itu, juga perlu adanya aturan dan atau kebijaksanaan menyangkut pemberian dorongan atau motivasi melalui penyediaan fasilitas, berupa teknologi ataupun akses pendanaan, bagi upaya-upaya penanaman kembali areal bekas tebangan dan lahan-lahan kosong, serta pemeliharaan / pembinaan tanaman hutan rakyat.
3. Perlu dilaksanakan kajian tentang kelembagaan yang efektif dan unit pengelolaan hutan rakyat yang optimum, yang dapat menjamin kontinuitas hasil dan manfaat bagi para pemiliknya, tanpa mengabaikan fungsi perlindungan dari hutan rakyat yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Clutter, J.L., J.C. Fortson, L.V. Pienar, G.H.Brister, and R.L. Biiley, 1982. *Timber Management : A Quantitative Approach*.
- Davis, L. S. and K. N. Johnson, 1987. *Forest Management*. Third Edition. McGaw-Hill Book Company. New York.
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja, 2005. *Potensi dan Penyebaran Hutan Rakyat di Kabupaten Tana Toraja*.
- Malamassam, D., 1998. *Inventarisasi Hutan*. Diklat, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Simon, H., 1993. *Metode Inventore Hutan*. Aditiya Media. Yogyakarta.
- Tiro, Muh. A., 2000. *Dasar-Dasar Statistika*. Edisi Revisi. State University of Makassar Press. Makassar.

Diterima : 03 Januari 2007

Daud Malamassam

Lab. Perencanaan dan Sistem Informasi, Jurusan Kehutanan, Universitas Hasanuddin
Kampus Tamalanrea, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telp./Fax. 0411-585917. Indonesia